



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Perkara Pilgub Maluku Utara Segera Diputus MK

Jakarta, 17 September 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali selaku Pasangan Calon (Pason) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 terhadap KPU Provinsi Maluku Utara (Termohon) pada Senin (17/09) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 ini akan diputus bersama dengan enam perkara lain, yaitu lima perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Mimika dan satu perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Paniai (71/PHP.BUP-XVI/2018).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan Kamis (26/07) lalu, diketahui bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 1,39% atau 7870 suara. Dalam keterangannya, Kuasa Hukum Pemohon mengungkapkan bahwa Ahmad Hidayat Mus selaku Calon Gubernur Nomor Urut 1 telah melakukan kecurangan pada Pilkada 2018 bahkan sebelumnya terbukti melakukan kecurangan yang sama pada Pilkada 2013 lalu. Kecurangan tersebut meliputi pengusiran dan pemukulan saksi Pemohon dan tidak memberikan C-1 kepada saksi Pemohon. Kuasa Hukum Pemohon juga mengungkapkan bahwa pada pemungutan suara kali ini, sejumlah pemilih diketahui telah meninggal dunia atau berada di luar daerah. Selanjutnya, perolehan suara terhadap Pason Nomor Urut 1 di sejumlah TPS ditemukan janggal, yaitu 100% bahkan melebihi 100%.

Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon, Pihak Terkait, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panitia Pengawas (Panwas) Rabu (01/08), Ali Nurdin selaku Kuasa Hukum Termohon menyoroti pengajuan perbaikan permohonan Pemohon yang dinilai telah melewati tahap pencatatan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Kuasa Hukum Termohon juga berargumen bahwa permohonan Pemohon tidak diuraikan secara jelas sehingga melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam PHP Gubernur, Bupati dan Walikota. Selanjutnya, Kuasa Hukum Termohon mengungkapkan bahwa dalil Pemohon yang menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU) di enam desa tidak berdasar. Dalam keterangan Termohon, pemungutan suara di enam desa tersebut tidak diselenggarakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wilayah setempat sehingga masyarakat tidak bersedia untuk memilih. Pada sidang pleno Senin (20/08), Kepala Desa Bobaneigo Abdullah Fara selaku saksi Pemohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara membenarkan persoalan mengenai wilayah Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara.

Pada sidang lanjutan, Rabu (05/09), Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan bahwa telah terjadi pemekaran wilayah yang mengakibatkan perubahan wilayah administrasi di Maluku Utara. Zudan juga membenarkan persoalan status wilayah Desa Pasir Putih, Desa Bobaneigo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Gamsungi, dan Desa Dum Dum yang perlu ditegaskan oleh Pemerintah setempat. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id | www.mkri.id